

APLIKASI ANALYTIC NETWORK PROCESS DALAM MENGURAI MASALAH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ETAP PADA USAHA KECIL MENENGAH DI JAWA BARAT

Wawan Sukmana

E-mail: wawansukmana@unsil.ac.id

Irman Firmansyah

E-mail: irman_tasik@yahoo.co.id

ABSTRACT

SAK ETAP is a standard compilation of financial reports used by SMEs. In fact the average SME compile a report that doesn't conform to the standards so that the company doesn't know the true financial condition. So, this study aimed to analyze the cause of not using SAK ETAP and offered solutions that can be used SAK ETAP. This research implemented in West Java using Analytic Network Process method of qualitative-quantitative. The respondents are experts, academics, practitioners and regulation of knowing the condition of SMEs in West Java. The results showed that the cause is not implemented SAK ETAP at SMEs in West Java consists of an internal problem that are enterprise management are unprofessional followed by SMEs did not know SAK ETAP and external problems are not the socialization and training SAK ETAP followed by allowed to calculate the tax to the norm. While the highest overall problem that is unprofessional management. Then the solutions offered range from internal solutions to train in the SAK ETAP financial reporting and followed by improve the professionalism of management and external solution consisting of worked on a simple guide on SAK ETAP and socialization importance SAK ETAP. while the highest overall solutions that improve the professionalism of management. Kendall's Coefficient (W) of the respondents around 0.708 to 0.904

that is the value that indicates the similarity between the answers of the respondents.

Keywords: analytic network process, SAK ETAP, SMEs

JEL classification: C38, M41

PENDAHULUAN

Usaha kecil dan menengah merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Keberadaan usaha kecil menengah tersebut harus didukung dan didorong kemampuannya agar tetap eksis, sehingga dapat memperluas kesempatan usaha dan memperluas lapangan pekerjaan. Usaha Kecil Menengah (UKM) mempunyai peran penting dan strategis bagi pertumbuhan ekonomi negara, baik negara berkembang maupun negara maju (Auliyah, 2012).

Masalah utama yang menjadi fokus dalam pengembangan usaha kecil menengah adalah mengenai pengelolaan keuangan serta laporannya. Kelemahan UKM dalam penyusunan laporan keuangan itu antara lain disebabkan rendahnya pendidikan dan kurangnya pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan

(SAK). Beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk suatu entitas dibandingkan dengan SAK Umum dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Sesuai ruang lingkup SAK ETAP, maka standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelola usaha, kreditur, dan lembaga.

Jawa Barat merupakan provinsi yang banyak melahirkan UKM. Ini terbukti dengan banyaknya sentra-sentra industri baik kerajinan dengan tangan maupun yang menggunakan mesin. Oleh karena itu, kemajuan UKM di Jawa Barat harus ditunjang dengan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP agar memberikan kelancaran terutama dalam mengembangkan usahanya dengan memberikan informasi keuangan kepada pihak internal maupun pihak eksternal yang membutuhkannya. Dalam hal UKM membutuhkan bantuan pinjaman dana guna memenuhi kebutuhan finansialnya, maka pihak kreditur termasuk bank menganalisis keadaan keuangan UKM melalui laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK ETAP. Keberadaan SAK ETAP seharusnya menjadi hal yang sedikit banyak sudah harus diketahui dan diterapkan dalam laporan keuangan para pelaku UKM.

Hasil penelitian sebelumnya mengenai penerapan SAK ETAP pada UKM telah dilaksanakan oleh Auliyah (2012) di Kampung Batik Sidoarjo yang menyimpulkan bahwa secara garis besar pengusaha Kampung Batik Sidoarjo hanya menerapkan akuntansi sederhana dan laporan keuangan yang mereka buat belum sesuai dengan SAK ETAP. Penelitian Rudiantoro dan Siregar (2012) menunjukkan bahwa masih rendahnya kualitas laporan keuangan UMKM sehingga perbankan meragukan relevansi dan keandalan kualitas laporannya. Pinasti (2001) menemukan bahwa para pedagang kecil di pasar tradisional di kabupaten Banyumas tidak menyelenggarakan dan tidak menggunakan informasi akuntansi dalam pengelolaan usahanya. Keputusan-keputusan dalam pengelolaan usaha lebih banyak didasarkan pada informasi-informasi non akuntansi dan pengamatan sepintas atas situasi pasar. Jati, dkk. (2004)

menyatakan bahwa pada saat ini kebanyakan UMKM masih belum menyelenggarakan pembukuan akuntansi dan pelaporannya dengan baik. Pelaksanaan pembukuan akuntansi untuk menyediakan laporan keuangan yang informatif merupakan hal yang masih sulit bagi UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya terbukti masih banyak masalah dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai standar pada UKM. Oleh karena itu, melalui pendekatan *Analytic Network Process* (ANP) penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apa yang menjadi masalah penerapan akuntansi berdasarkan SAK ETAP pada UKM di Jawa Barat disertai dengan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan hasil proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antardata keuangan/aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data/aktivitas tersebut. Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan keuangan menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter.

Selain dari itu, setiap keputusan yang diambil oleh pemilik dalam mengembangkan usahanya akan didasarkan pada kondisi keuangan yang diinformasikan secara lengkap pada laporan keuangan. Oleh karena itu Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan standar akuntansi yang cocok untuk entitas yang tanpa akuntabilitas publik yang salah satunya adalah UKM. Standar yang dimaksud dinamakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Penerapan dini diperkenankan. Jika SAK ETAP diterapkan dini, maka entitas harus menerapkan SAK ETAP untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010 (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analytic Network Process*. Dalam metodologi *Analytic Network Process* (ANP), data yang digunakan merupakan data primer yang didapat dari hasil wawancara dengan pakar, praktisi, dan regulator yang

memiliki pemahaman tentang permasalahan yang dibahas. Dilanjutkan dengan pengisian kuesioner pada pertemuan kedua dengan responden. Data siap olah dalam ANP merupakan variabel-variabel penilaian responden terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian dalam skala numerik (Jarkasih, 2008).

Pemilihan responden pada penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan pemahaman responden tersebut terhadap permasalahan penyusunan laporan keuangan pada UKM di Jawa Barat. Jumlah responden dalam penelitian ini terdiri dari tujuh orang, dengan pertimbangan bahwa mereka cukup berkompeten dalam mewakili keseluruhan populasi. Dalam analisis ANP jumlah sampel/responden tidak digunakan sebagai patokan validitas. Syarat responden yang valid dalam ANP adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Oleh karena itu, responden yang dipilih dalam survei ini adalah para pakar/peneliti, akademisi, regulasi, praktisi/profesional, yang berkecimpung dalam UKM.

Pertanyaan dalam kuesioner ANP berupa *pair-wise comparison* antarelemen dalam *cluster* untuk mengetahui mana di antara keduanya yang lebih besar pengaruhnya (lebih dominan) dan seberapa besar perbedaannya dilihat dari satu sisi. Skala numerik 1-9 yang digunakan merupakan terjemahan dari penilaian

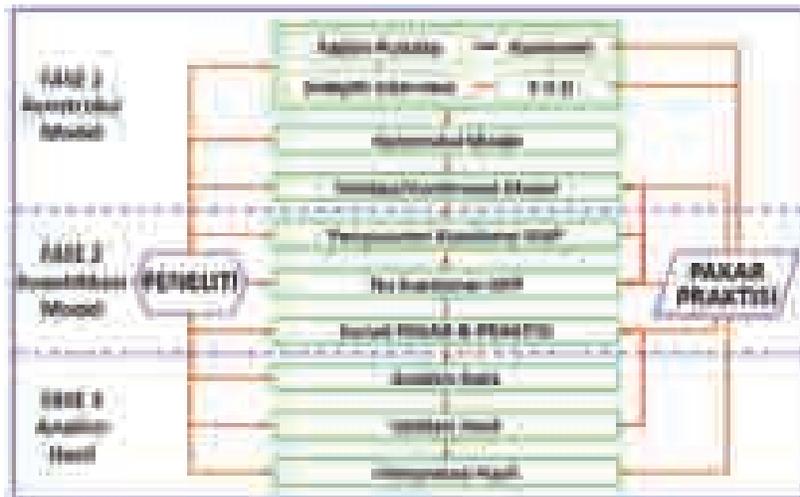
verbal. Pengisian kuesioner oleh responden harus didampingi peneliti untuk menjaga konsistensi jawaban yang diberikan. Pada umumnya, pertanyaan pada kuesioner ANP sangat banyak jumlahnya, sehingga faktor-faktor non teknis dapat menyebabkan tingginya tingkat inkonsistensi.

Tabel 1
Perbandingan Skala Verbal dan Skala Numerik

| Skala Verbal | Skala Numerik |
|-------------------------------------|---------------|
| Amat sangat lebih besar pengaruhnya | 9 |
| | 8 |
| Sangat lebih besar pengaruhnya | 7 |
| | 6 |
| Lebih besar pengaruhnya | 5 |
| | 4 |
| Sedikit lebih besar pengaruhnya | 3 |
| | 2 |
| Sama besar pengaruhnya | 1 |

Sumber: Ascarya (2005).

Berikut ini disajikan Gambar 1 tentang tahapan penelitian dengan metode ANP:



Sumber: Ascarya dan Yumanita (2010).

Gambar 1
Tahapan Penelitian

Metode ANP memiliki tiga fungsi utama sebagai berikut, yaitu 1) melakukan strukturalisasi pada kompleksitas. Dalam penelitiannya, Saaty (2006) menemukan adanya pola-pola yang sama dalam sejumlah contoh tentang bagaimana manusia memecahkan sebuah kompleksitas dari masa ke masa, yang mana kompleksitas distruktur secara hierarkis ke dalam *cluster-cluster* yang homogen dari faktor-faktor; 2) pengukuran ke dalam skala rasio. ANP menggunakan skala rasio pada semua level terendah dari hierarki/jaringan, termasuk level terendah (alternatif dalam model pilihan). Skala rasio ini menjadi semakin penting jika prioritas tidak hanya digunakan untuk aplikasi pilihan, namun untuk aplikasi-aplikasi lain, seperti untuk aplikasi alokasi sumberdaya; dan 3) sintesis *geometric mean* dan *rater agreement*. *Geometric mean* merupakan jenis penghitungan rata-rata yang menunjukkan tendensi atau nilai tertentu dimana memiliki formula sebagai berikut (Ascarya, 2011):

$$G = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n} \quad (1)$$

Rater agreement merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian (persetujuan) para responden (R1-Rn) terhadap suatu masalah dalam satu *cluster*. Adapun alat yang digunakan untuk mengukur *rater agreement* adalah *Kendall's Coefficient of Concordance* ($W; 0 < W \leq 1$). $W=1$ menunjukkan kesesuaian yang sempurna (Ascarya, 2011). Untuk menghitung Kendall's (W), yang pertama adalah dengan memberikan ranking pada setiap jawaban kemudian menjumlahkannya.

$$R_i = \sum_{j=1}^n r_{ij} = 1 \cdot r_{1i} \quad (2)$$

Nilai rata-rata dari total ranking adalah:

$$\bar{R} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n R_i \quad (3)$$

Jumlah kuadrat deviasi (S), dihitung dengan formula:

$$S = \sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})^2 \quad (4)$$

sehingga diperoleh Kendall's W, adalah:

$$W = \frac{12S}{n^3 - n} \quad (5)$$

Jika nilai pengujian W sebesar 1 ($W=1$), maka disimpulkan bahwa penilaian atau pendapat dari para responden memiliki kesesuaian yang sempurna, sedangkan jika nilai W sebesar 0 atau semakin mendekati 0, maka menunjukkan adanya ketidaksesuaian antarjawaban responden atau jawaban bervariasi (Ascarya, 2011).

HASIL PENELITIAN

Berdasar penelitian yang telah dilakukan melalui *in-depth interview* terhadap tujuh orang responden yang kompeten di bidang UKM dan penyusunan laporan keuangan, maka diketahui terdapat masalah dalam penerapan SAK ETAP pada penyusunan laporan keuangan UKM di Jawa Barat yang selanjutnya penulis bagi menjadi dua kategori yaitu masalah internal dan masalah eksternal. Masalah yang terjadi pada UKM adalah mengapa UKM tidak menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP.

Masalah internal meliputi 1) biaya tinggi. Ini terjadi karena menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar membutuhkan orang khusus yang menguasai akuntansi sehingga perusahaan harus mengeluarkan gaji yang tinggi agar sesuai dengan penghargaan terhadap strata pendidikannya; 2) budaya tertutup. Hal ini merupakan faktor internal yang telah menjadi budaya bahwa rata-rata UKM adalah perusahaan pribadi yang kondisi sesungguhnya sengaja tidak diperlihatkan kepada pihak luar guna menyembunyikan sorotan pihak-pihak yang berkepentingan; 3) manajemen tidak profesional. Rata-rata UKM mengelola perusahaan tidak dilakukan secara profesional melainkan dengan konsep rumah tangga sehingga segala bentuk pencatatan atau pembukuan dilakukan seadanya; 4) menghindari pajak. UKM sengaja tidak membuat pembukuan yang benar agar kondisi keuangan perusahaan tidak diketahui oleh Kantor Pajak mengingat saat ini tarif pajak dinilai sangat memberatkan; 5) menyita waktu. Membuat laporan keuangan sesuai standar membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga mengganggu pekerjaan lain karena orientasi UKM pada umumnya difokuskan pada pemasaran bukan pada penyusunan laporan keuangan; 6) minimnya Sumber Daya Manusia (SDM). Faktor ini menjadi penyebab yang sangat menonjol dari setiap *interview* yang dilakukan mengingat banyak SDM khususnya bagian keuangan bukan berasal dari lulusan

akuntansi; 7) Tidak mengenal SAK ETAP. Semua responden baik praktisi maupun non praktisi mempunyai penilaian bahwa saat ini UKM tidak mengenal SAK ETAP sehingga selama belum mengenal SAK ETAP maka otomatis UKM tidak akan menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP.

Masalah eksternal meliputi 1) diperkenankannya menghitung pajak dengan norma. Ini adalah awal dari penerapan PP 46 tahun 2013 bahwa tarif pajak diambil dari total omset sehingga UKM yang mempunyai omset di bawah Rp4,8 milyar tidak diwajibkan membuat laporan keuangan sesuai standar; 2) kurang tegasnya kreditor/bank dalam meminta persyaratan membuat laporan keuangan sesuai SAK ETAP. Hal ini menjadi salah satu penyebab eksternal karena saat ini bank sebagai kreditor justru melakukan analisis keuangan tidak dari laporan keuangan yang sebenarnya melainkan laporan keuangan yang dibuat dengan rekayasa demi memenuhi persyaratan pencairan pinjaman; 3) kurang tersedianya panduan yang simpel mengenai SAK ETAP. Hal ini menjadi kendala UKM karena baru dapat menyusun laporan keuangan jika prosesnya mudah, hal ini berkaitan dengan SDM, waktu, dan biaya yang dikeluarkan; 4) terbatasnya SDM pemerintah/profesi dalam melakukan sosialisasi karena keterbatasan SDM yang dimiliki pemerintah dalam menyediakan instruktur pelatihan penyusunan laporan; 5) tidak ada sosialisasi dan pelatihan SAK ETAP. Seharusnya pihak yang berkompeten memberikan pelatihan karena UKM merasa kurang menyerap tentang pentingnya SAK ETAP dalam melakukan praktik akuntansi.

Berdasar permasalahan tersebut, selanjutnya solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah penerapan SAK ETAP pada penyusunan laporan keuangan UKM di Jawa Barat melalui para responden yang dirangkum dari hasil *indepth interview*. Solusi yang ditawarkan dibagi menjadi dua kategori yaitu solusi internal dan solusi eksternal. Empat solusi internal yaitu 1) mengikuti pelatihan menyusun laporan keuangan SAK ETAP; 2) meningkatkan profesionalisme manajemen; 3) merekrut lulusan SMK; dan 4) peningkatan kesadaran pentingnya transparansi. Enam solusi eksternal yaitu 1) dirumuskan panduan yang simpel tentang SAK ETAP; 2) ketegasan kreditor/bank dalam mewajibkan UKM membuat laporan keuangan sesuai SAK ETAP; 3) ketegasan pemerintah dalam mewajibkan

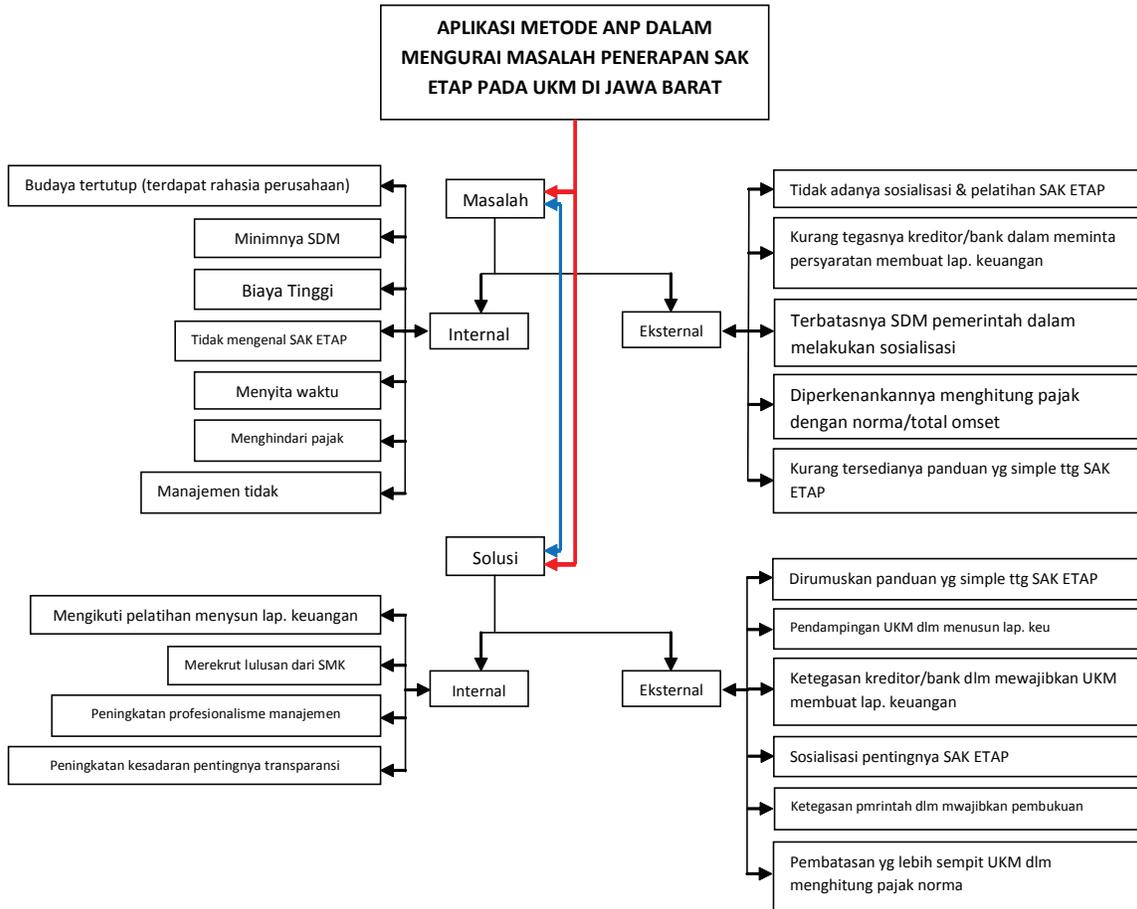
pembukuan; 4) pembatasan yang lebih sempit kepada UKM dalam menghitung pajak dengan norma (PP 46 tahun 2013); 5) pendampingan UKM dalam menyusun laporan keuangan; dan 6) sosialisasi pentingnya SAK ETAP.

Berdasarkan permasalahan dan solusi yang ditawarkan tersebut, maka dibentuklah jaringan (Model) ANP guna menganalisis hasil penelitian sehingga dibentuk kuesioner sesuai masalah dan solusi yang telah dijelaskan sebelumnya. Model penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.

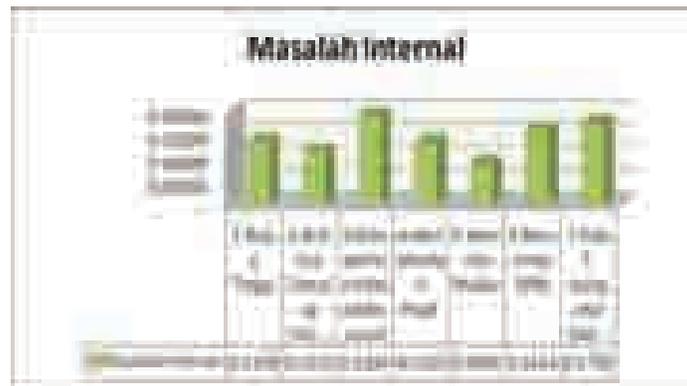
PEMBAHASAN

Berdasar hasil analisis menggunakan *software super decision* sesuai konsensus responden, maka diketahui bahwa masalah tertinggi dari cluster internal yaitu “*manajemen tidak profesional*” yang diikuti dengan “*tidak mengenal SAK ETAP*”. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan yang dominan para UKM yang ada di Jawa Barat kaitannya dengan permasalahan penyusunan laporan keuangan, adalah manajemen tidak profesional, sehingga menjadi dampak tidak baik terhadap pengadministrasian keuangan perusahaan karena dilakukan dengan konsep rumah tangga dan seadanya yang tidak mementingkan informasi yang riil. Masalah kedua yaitu UKM tidak mengenal SAK ETAP, karena yang diketahui hanyalah pencatatan atau pembukuan yang biasa. Oleh karena itu, wajar jika UKM tidak menyusun laporan keuangan yang wajar, karena nama SAK ETAP pun tidak cukup familiar di ranah UKM sehingga dibutuhkan perhatian khusus para pihak yang berkepentingan. Nilai *rater agreement* yaitu sebesar $W=0,834$ atau 83,4% yang menunjukkan kesepakatan yang tinggi di antara responden dalam menjawab masalah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.

Prioritas selanjutnya yaitu dari sisi aspek masalah eksternal. Gambar 4 menunjukkan prioritas masalah eksternal dan terlihat dari kelima masalah tersebut yang paling menonjol yaitu “*tidak adanya sosialisasi dan pelatihan tentang SAK ETAP*”. UKM tidak cukup informasi untuk mengetahui hal itu karena jika harus mempelajari dari buku maka akan menghabiskan waktu lama untuk mempelajari. Oleh karena itu, jika tidak ada sosialisasi dari pemerintah atau pihak yang berkepentingan maka ini menjadi masalah yang



Gambar 2
Jaringan ANP

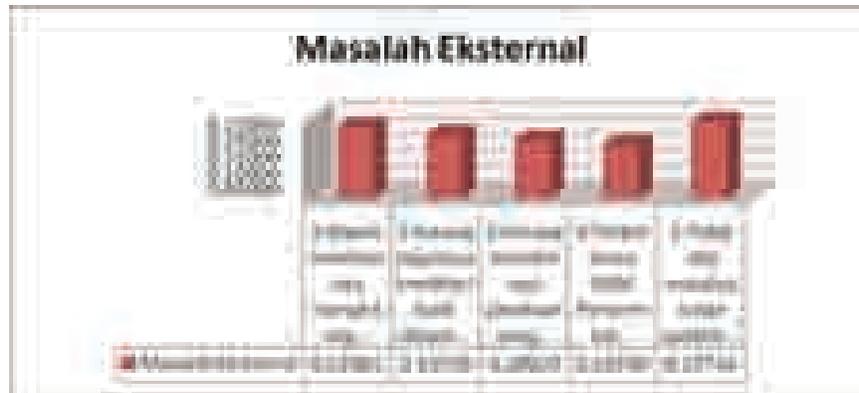


Gambar 3
Prioritas Masalah Internal

paling besar di antara masalah lain dari sisi eksternal. Masalah kedua yaitu “diperkenankannya menghitung pajak dengan norma”. UKM tentunya tidak akan repot-repot membuat laporan keuangan yang sesuai standar jika pihak pemerintah dalam hal ini kantor pajak tidak mewajibkannya, khususnya UKM yang mempunyai omset di bawah Rp4,8 milyar. Adapun nilai *rater agreement* aspek masalah eksternal yaitu sebesar $W=0,763$ atau 76,3%. Nilai ini cukup besar sehingga menunjukkan kesamaan jawaban di antara masing-masing responden.

Selanjutnya untuk melihat masalah tertinggi dalam *cluster* masalah secara keseluruhan, maka dapat dilihat pada Gambar 5:

Berdasar Gambar 5 dapat dilihat bahwa “manajemen tidak profesional” menjadi faktor yang paling besar dari semua masalah yang menyebabkan tidak diterapkannya SAK ETAP pada UKM di Jawa Barat. Dengan nilai *rater agreement* sebesar 0,904 menunjukkan bahwa semua responden mempunyai kesepakatan dengan jawaban yang sama.



Gambar 4
Prioritas Masalah Eksternal

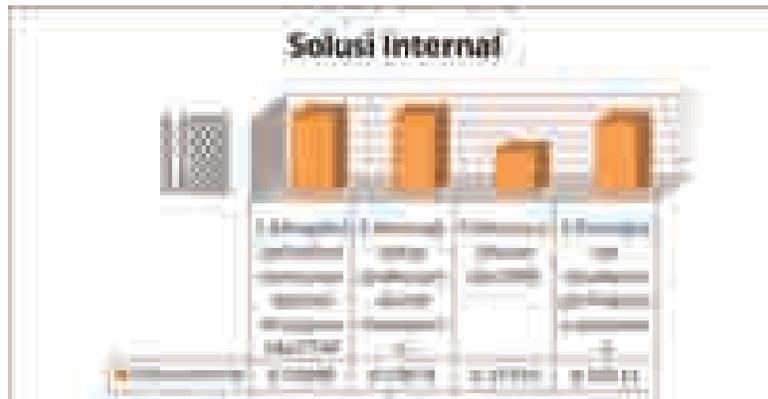


Gambar 5
Prioritas Masalah Keseluruhan

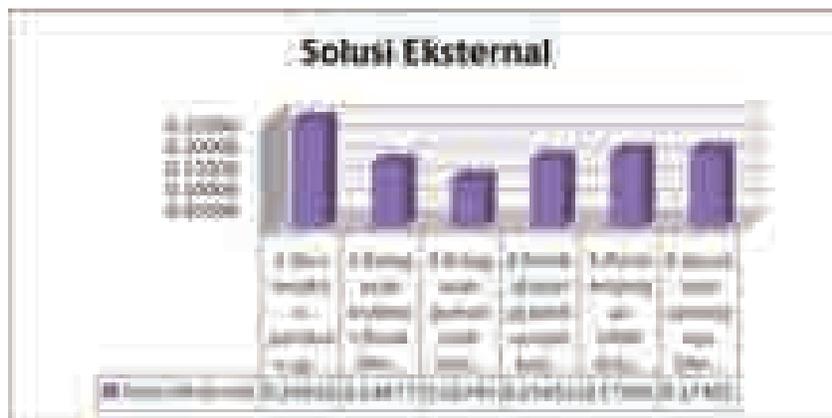
Setelah diketahui masalah yang ada, maka langkah selanjutnya yaitu membuat solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Aspek solusi dibagi menjadi dua yaitu solusi internal dan solusi eksternal. Gambar 6 menunjukkan hasil analisis solusi internal. Berdasar keempat solusi internal yang ada pada Gambar 6, solusi yang paling tinggi yaitu “*mengikuti pelatihan penyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP*”. Ini menunjukkan bahwa dibutuhkan adanya pelatihan yang intensif agar UKM terbiasa membuat laporan keuangan yang menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Solusi kedua yaitu “*peningkatan profesionalisme manajemen*”. Ini mengingat jika pengelolaan perusahaan tidak dilakukan dengan profesional maka UKM tidak akan menyusun laporan keuangan

secara tertib. Meskipun telah mengikuti pelatihan, tetapi tidak akan bertahan lama jika tidak ada kesadaran untuk memperbaiki pengelolaan perusahaan. Nilai *rater agreement* prioritas aspek solusi internal sebesar $W=0,708$, sehingga koefisien ini cukup besar dan menunjukkan kesamaan jawaban dari tiap responden.

Selanjutnya prioritas aspek solusi eksternal yang ditunjukkan pada Gambar 7. Berdasar enam solusi yang ditawarkan, ternyata solusi yang paling tinggi yaitu “*dirumuskannya panduan yang simpel mengenai SAK ETAP*”. Ini menjadi solusi yang paling tinggi jauh dari solusi yang lainnya, mengingat UKM tidak ingin menambah pekerjaan yang sulit dan menghabiskan waktu lama, karena fokus UKM bukan pada menyusun laporan keuangan akan tetapi pada



Gambar 6
Prioritas Solusi Internal



Gambar 7
Prioritas Solusi Eksternal

memasarkan produk. Solusi selanjutnya yaitu “*sosialisasi pentingnya SAK ETAP*”. Ini dikarenakan mayoritas UKM tidak mengetahui SAK ETAP sehingga dibutuhkan adanya sosialisasi mengenai pentingnya SAK ETAP karena dengan SAK ETAP maka UKM akan mengetahui kondisi keuangan yang sebenarnya. Oleh karena itu, UKM dapat mengambil kebijakan atas informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan yang telah dibuat dan tidak hanya berfokus terhadap pemasaran semata. Nilai *rater agreement* aspek solusi eksternal sebesar $W=0,806$, sehingga koefisien yang sangat besar ini menunjukkan jawaban di antara para responden bersifat homogen.

Untuk mengetahui solusi yang paling tinggi di antara semua solusi yang ada baik internal maupun eksternal dapat dilihat pada Gambar 8. Berdasar gambar tersebut maka solusi yang paling tinggi yaitu “*meningkatkan profesionalisme manajemen*”. Ini terjadi karena jika perusahaan telah dikemas dengan profesional maka pengelolaan dan pelaporan keuangan pun akan tertib dan sesuai dengan standar terutama SAK ETAP. Dengan nilai *rater agreement* yaitu sebesar 0,885 yang menunjukkan bahwa semua responden mempunyai kesepakatan yang sama.

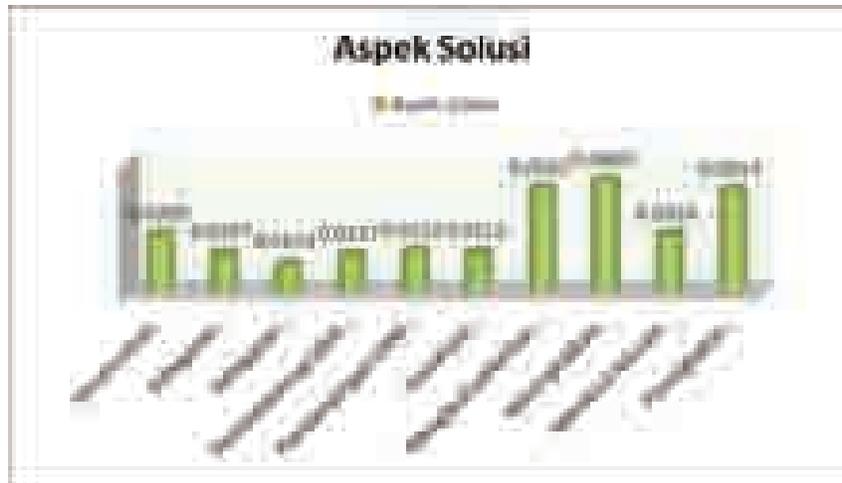
Ketiga solusi tersebut berasal dari aspek internal yang menandakan bahwa penyelesaian masalah penerapan SAK ETAP harus dimulai dari internal perusahaan baru ke aspek eksternal. Hal ini tentunya

sepakat dengan beberapa peneliti sebelumnya yang mempunyai temuan masalah dari segi internal seperti hasil penelitian Auliyah (2012) yang menyatakan bahwa mayoritas pengusaha UKM belum mengetahui adanya SAK ETAP; Rudiantoro dan Siregar (2012) yang menyimpulkan bahwa perbankan masih meragukan relevansi dan keandalan kualitas laporan keuangannya akibat masih rendahnya pemahaman para pengusaha UMKM atas SAK ETAP tersebut; Pinasti (2001) menemukan bahwa para pedagang kecil di pasar tradisional di kabupaten Banyumas merasa terlalu direpotkan dengan penyelenggaraan catatan akuntansi; yang penting mendapatkan laba tanpa direpotkan dengan penyelenggaraan akuntansi; Jati, dkk (2004) menyatakan bahwa pelaksanaan pembukuan akuntansi untuk menyediakan laporan keuangan yang informatif merupakan hal yang masih sulit bagi UMKM.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa penyebab tidak diterapkannya SAK ETAP pada UKM di Jawa Barat dalam penyusunan laporan keuangannya, terdiri atas dua masalah yaitu masalah internal dan masalah eksternal. Masalah internal, masalah tertinggi yaitu “*manajemen tidak profesional*” yang diikuti dengan



Gambar 8
Prioritas Solusi Keseluruhan

“tidak mengenal SAK ETAP”, sedangkan masalah eksternal, masalah tertinggi yaitu “tidak ada sosialisasi dan pelatihan SAK ETAP” yang diikuti dengan “diperkenalkannya menghitung pajak dengan norma”. Namun, untuk masalah tertinggi pada *cluster* masalah secara keseluruhan yang paling dominan yaitu “manajemen tidak profesional”. Solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut terdiri dari solusi internal dan eksternal. Solusi internal yang paling dominan yaitu “mengikuti pelatihan membuat laporan keuangan SAK ETAP” yang diikuti dengan “meningkatkan profesionalisme manajemen”, sedangkan solusi eksternal yang paling dominan adalah “dirumuskannya panduan yang simpel mengenai SAK ETAP” yang diikuti dengan “sosialisasi pentingnya SAK ETAP”. Adapun solusi pada *cluster* solusi secara keseluruhan yang paling dominan adalah “meningkatkan profesionalisme manajemen”.

Saran

Berkaitan dengan solusi internal, mengikuti pelatihan membuat laporan keuangan berbasis SAK ETAP. Pelatihan ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak perguruan tinggi studi akuntansi melalui program Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ataupun kerjasama dengan profesi yakni Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai pihak yang menyusun SAK ETAP. Berkaitan dengan solusi eksternal, dirumuskan panduan yang simpel mengenai SAK ETAP. Hal ini bisa dilakukan melalui kerja sama dengan IAI untuk dibuatkan panduan ringkas tentang penggunaan SAK ETAP. Berkaitan dengan solusi secara keseluruhan, meningkatkan profesionalisme manajemen. Ini dapat dilakukan dengan pelatihan-pelatihan yang terus menerus memuat materi tentang aspek manajerial, termasuk di dalamnya bidang akuntansi dan keuangan, bidang hukum, bidang produksi, dan bidang pemasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Ascarya. 2005. *Analytic Network Process (ANP): Pendekatan Baru Studi Kualitatif*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan. Bank Indonesia.

Ascarya dan Yumanita, Diana. 2010. “Determinan dan Persistensi Margin Perbankan Konvensional dan Syariah di Indonesia”. *Working Paper Series* No. WP/10/04. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.

Ascarya. 2011. “The Persistence of Low Profit and Loss Sharing Financing in Islamic Banking: The Case of Indonesia”. *Review of Indonesian economic and business studies*, 1.

Auliyah, Iim Ma'rifatul. 2012. “Penerapan Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP Pada UKM Kampung Batik di Sidoarjo”. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya (tidak dipublikasikan).

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas TANPa Akuntabilitas Publik, Per 1 Oktober*. Jakarta. Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

Jarkasih, Muhamad. 2008. “Analisis Masalah dalam Pengembangan Sukuk Korporasi di Indonesia dengan Metode *Analytic Network Process (ANP)*”, *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia (tidak dipublikasikan).

Jati, Hironnymus, Bala, Beatus, dan Otnil Nisoni. 2004. “Menumbuhkan Kebiasaan Usaha Kecil Menyusun Laporan Keuangan”. *Jurnal Bisnis dan Usahawan*, 2(8): 210 -218

Pinasti, Margani. 2001. “Penggunaan Informasi Akuntansi dalam Pengelolaan Usaha ParaPedagang Kecil di Pasar Tradisional Kabupaten Banyumas”, *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 3(1).

Rudiantoro, Rizki dan Siregar, Sylvia Veronica. 2012. “Kualitas Laporan Keuangan UMKM serta Prospek Implementasi SAK ETAP”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(1).

Saaty, Thomas L and Vargas, Louis G. 2006. *Decision Making with the Analytic Network Process. Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks*. Springer. RWS Publication, Pittsburgh.